

Pertamina Group  
**REPORT ON PAYMENTS  
TO GOVERNMENTS  
2023**





# Table of Contents

<b>I. Pembukaan</b> Introduction	1
<b>II. Dasar Penyusunan Laporan</b> Basis of Preparation	2
<b>III. Informasi per Negara</b> Information by Country	5
<b>IV. Informasi antar Pemerintahan</b> Information per Government	5
<b>V. Informasi tiap <i>Project</i></b> Information per Project	6





# I. Pembukaan

## Introduction

Peraturan Indonesia mewajibkan perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif (termasuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Grup Pertamina) untuk menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan mengenai pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah sebagai hasil dari operasi ekstraktif. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina (subholding upstream) sebagai entitas yang melakukan kegiatan di bidang industri ekstraktif.

Laporan ini dipersiapkan berdasarkan data pembayaran pajak, royalti dan pembayaran pajak lainnya di setiap negara tempat Anak Perusahaan Pertamina (subholding upstream) melakukan kegiatan usaha.

Dengan peraturan ini, Pertamina berusaha mematuhi standar internasional dalam pelaporan pajak, mendukung upaya global untuk penghindaran pajak, dan memastikan sistem perpajakan yang lebih adil.

Indonesian regulations require companies involved in the extractive industry (including exploration and production of oil and gas conducted by the Pertamina Group) to prepare and publish an annual report on payments made to the government due to extractive operations. This report provides a comprehensive overview of payments to the government made by Pertamina's subsidiaries (upstream subholding) as entities engaged in the extractive industry.

This report is prepared based on data on tax payments, royalties, and other tax payments in each country where Pertamina's subsidiaries (upstream subholding) conduct business activities.

With this regulation, Pertamina strives to comply with international standards in tax reporting, support global efforts to prevent tax avoidance and ensure an equitable tax system.



## II. Dasar Penyusunan Laporan

### Basis of Preparation

#### Dasar Hukum

Laporan ini memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan "Ketentuan Transparansi Pembayaran" dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Peraturan ini mengharuskan perusahaan yang terdaftar di pasar modal di Indonesia yang terlibat dalam industri ekstraktif untuk menyiapkan dan mempublikasikan laporan mengenai pembayaran kepada pemerintah untuk setiap tahun keuangan, secara konsolidasi.

Prinsip pelaporan yang diadopsi telah mempertimbangkan interpretasi resmi dari regulasi yang dikeluarkan oleh badan nasional dan internasional, serta praktik industri. Aturan yang berlaku menetapkan lingkup konsolidasi yang sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup data dari operasi bersama yang dikonsolidasikan secara proporsional oleh Pertamina. Data dari entitas yang diakui berdasarkan metode ekuitas (ventura bersama atau asosiasi yang tergabung) dikecualikan dari laporan ini.

#### Ruang Lingkup Laporan

Laporan ini mengungkapkan pembayaran pajak, Bonus Tanda Tangan, Setoran Dividen, Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan kepada pemerintah terkait dengan kegiatan Pertamina yang melibatkan eksplorasi, dan eksploitasi minyak (termasuk kondensat) dan gas alam.

#### Pemerintahan

Pemerintah dalam hal ini merujuk pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### Legal Basis

This report complies with the reporting obligations as per the "Payment Transparency Provisions" of the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia Number 172 of 2023 concerning implementing the Arm's Length Principle in Transaction Affected by Special Relationship. The regulation requires companies listed on the capital market in Indonesia involved in the extractive industry to prepare and publish a report on payments to the government for each financial year on a consolidated basis.

The reporting principles adopted have considered the official interpretations of the regulation issued by national and international governance and industry practices. The applicable rules establish the consolidation scope to be the same as that used in preparing the consolidated financial statements of PT Pertamina (Persero) by the Financial Accounting Standards (SAK), which includes data from Pertamina's proportionally consolidated joint operations. Data from equity-accounted entities (incorporated joint ventures or associates) are excluded from this report.

#### Activities within The Scope of The Report

This report discloses tax payments, Signature Bonuses, Dividend Deposits, State portion of Crude Oil and/or Condensate, and Non-Tax State Revenue made to the government related to Pertamina's activities involving exploration and exploitation of oil (including condensate) and natural gas.

#### Government

The government in this context refers to both the central government and local governments.



## Definisi Proyek

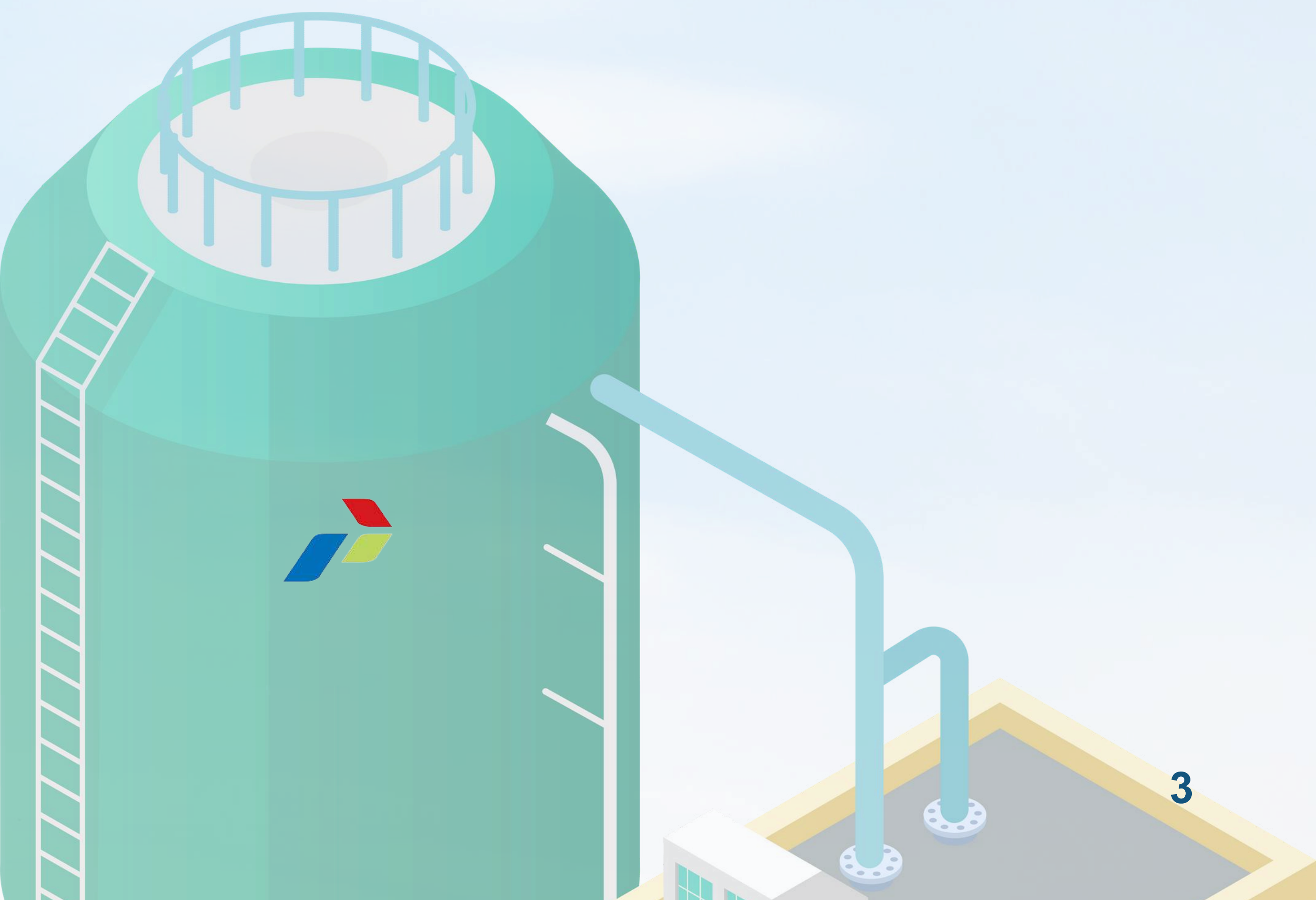
Laporan pembayaran ini disajikan pada tingkat proyek atau wilayah kerja (WK) di negara tempat kegiatan dilakukan. Proyek didefinisikan sebagai kegiatan operasional yang diatur oleh satu kontrak, lisensi, sewa, konsesi, atau perjanjian hukum serupa, dan membentuk dasar untuk satu atau lebih kewajiban pembayaran kepada pemerintah. Jika perjanjian tersebut "saling terkait secara substansial", perjanjian tersebut harus diperlakukan sebagai satu proyek tunggal. "Saling terkait secara substansial" berarti membentuk serangkaian perjanjian yang terintegrasi secara operasional dan geografis dengan ketentuan yang sangat mirip yang ditandatangani dengan pemerintah dan menimbulkan kewajiban pembayaran. Indikator integrasi termasuk, namun tidak terbatas pada, kedekatan geografis dan penggunaan infrastruktur bersama.

Pengungkapan pembayaran yang disebutkan dalam Laporan ini mencerminkan substansi kontrak atau kewajiban lain yang menimbulkan pembayaran tersebut.

## Project Definition

This payment report is presented at the project or work area (WK) level in the country where the activities are conducted. A project is defined as operational activities governed by a single contract, license, lease, concession, or similar legal agreement, forming the basis for one or more payment obligations to the government. If such agreements are "substantially interconnected," they should be treated as a single project. "Substantially interconnected" means forming a set of agreements that are operationally and geographically integrated with very similar terms, signed with the government, and giving rise to payment obligations. Indicators of integration include, but are not limited to, geographical proximity and the use of shared infrastructure.

The payment disclosures mentioned in this report reflect the substance of the contract or other obligation giving rise to the payments.





## Pembayaran

### 1. Pajak

Pajak yang dibahas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan peraturan terkait, termasuk pajak yang dikenakan atas pendapatan, keuntungan atau pajak yang dikenakan atas produksi dan royalti yang terkait dengannya produksi. Adapun pajak yang dikecualikan disini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

### 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pembayaran yang wajib dibayar oleh badan untuk memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Untuk jenis dan tarif PNBP berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

### 3. Bonus Tanda Tangan

Bonus Tanda Tangan adalah pembayaran dilakukan oleh kontraktor kepada pemerintah pada saat penandatanganan kontrak kerja sama. Peraturan hukum terkait bonus diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 dan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017.

### 4. Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara

Laporan ini mengungkapkan pembayaran pajak, Bonus Tanda Tangan, Setoran Dividen, Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan kepada pemerintah terkait dengan kegiatan Pertamina yang melibatkan eksplorasi, dan eksploitasi minyak (termasuk kondensat) dan gas alam.

### 5. Setoran Dividen

Laporan setoran dividen ditentukan sebagai persentase dari laba bersih perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk reinvestasi dalam bisnis, cadangan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk pembayaran dividen dilakukan atas laba tahun berjalan di tahun berikutnya (setelah keputusan RUPS).

## Payments

### 1. Taxes

The taxes discussed are as regulated under the General Tax Provisions Law (UU KUP) and related regulations, including taxes imposed on income, profits, or taxes levied on production and royalties related to that production. The taxes excluded here are consumption taxes such as Value-Added Tax (VAT), Personal Income Tax.

### 2. Non-Tax State Revenue

Non-Tax State Revenue refers to payments that must be made by entities to obtain direct or indirect benefits from services or the utilization of resources and rights obtained by the state. The types and rates of PNBP come from the utilization of renewable and non-renewable natural resources, as regulated by Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue.

### 3. Signature Bonus

Signature Bonus is a payment made by the contractor to the government at the time of signing the cooperation contract. The legal regulations related to bonuses are stipulated in Government Regulation No. 35 of 2004 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2017.

### 4. Crude Oil and/or Condensate Share of The State

This report discloses tax payments, Signature Bonuses, Dividend Deposits, Crude Oil and/or Condensate Shares of the State, and Non-Tax State Revenue (PNBP) made to the government in connection with Pertamina's activities involving the exploration and exploitation of oil (including condensate) and natural gas.

### 5. Dividend Deposit

The dividend deposit report is determined as a percentage of the company's net profit, considering the need for reinvestment in the business, reserves, and other relevant factors. Dividend payments are made on the current year's profit in the following year (after the AGM decision).

### III. Informasi per Negara Information by Country

Data dalam ratusan juta dollar  
Data in hundred million dollar

Benua	Negara	Taxes	PNBP	Signature Bonus	Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara	Setoran Dividen	Total
Asia							
	Indonesia	14.699,19	4.331,65	841,46	7.897,06	0,56	27.769,92
Eropa							
	Prancis	4.686,78	-	-	-	-	4.686,78
	Belgia	6,00	-	-	-	-	6,00
	Spanyol	512,00	-	-	-	-	512,00
	Swiss	(20,00)	-	-	-	-	(20,00)
Afrika							
	Gabon	17.154,00	-	-	-	-	17.154,00
	Tanzania	11.586,00	-	-	-	-	11.586,00
	Angola	12.200,00	-	-	-	-	12.200,00
<b>Total</b>		<b>60.823,97</b>	<b>4.331,65</b>	<b>841,46</b>	<b>7.897,06</b>	<b>0,56</b>	<b>73.894,70</b>

Kurs Neraca: 15,439  
per 31 Desember 2023

### IV. Informasi antar Pemerintahan Information Per Government

Data dalam ratusan juta dollar  
Data in hundred million dollar

Negara	Pemerintah	Taxes	PNBP	Signature Bonus	Minyak Mentah dan/atau Kondensat bagian Negara	Setoran Dividen	Total
Asia							
Indonesia							
	Directorate General Tax	14.699,19	4.331,65	841,46	7.897,06	0,56	27.769,92
	<b>Total</b>	<b>14.699,19</b>	<b>4.331,65</b>	<b>841,46</b>	<b>7.897,06</b>	<b>0,56</b>	<b>27.769,92</b>
Eropa							
Prancis							
	Direction générale des Finances publiques (DGFIP)	4.686,78	-	-	-	-	4.686,78
	<b>Total</b>	<b>4.686,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.686,78</b>
Belgia							
	Federal Public Service Finance (FPS Finances)	6,00	-	-	-	-	6,00
	<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>
Spanyol							
	Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	512,00	-	-	-	-	512,00
	<b>Total</b>	<b>512,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>512,00</b>
Swiss							
	Eidgenössische Steuerverwaltung (FTA)	(20,00)	-	-	-	-	(20,00)
	<b>Total</b>	<b>(20,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20,00)</b>
Afrika							
Gabon							
	Direction Générale des Impôts (DGID)	17.154,00	-	-	-	-	17.154,00
	<b>Total</b>	<b>17.154,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.154,00</b>
Tanzania							
	Tanzania Revenue Authority (TRA)	11.586,00	-	-	-	-	11.586,00
	<b>Total</b>	<b>11.586,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.586,00</b>
Angola							
	Administração Geral Tributária (AGT)	12.200,00	-	-	-	-	12.200,00
	<b>Total</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>
<b>Grand Total</b>		<b>60.823,97</b>	<b>4.331,65</b>	<b>841,46</b>	<b>7.897,06</b>	<b>0,56</b>	<b>73.894,70</b>

Kurs Neraca: 15,439  
per 31 Desember 2023



## V. Informasi tiap Proyek

### Information Per Project

Data dalam ratusan juta dollar  
Data in hundred million dollar

Yurisdiksi	Entitas	Income Tax Paid
<b>Indonesia</b> <b>(Current Year 2023)</b>		
	PT PHE - Parent Only	3.163
	PT PH ROKAN	225.574
	PT Pertamina EP	554.102
	PHE Lepas Pantai Bunyu	0
	PT PHE Abar	1
	PT Ambalat	0
	PT PHE Anggursi	1
	PT PHE Coridor	34.327
	PT PHE East Sepinggan	4.386
	PT PHE Jabung	29.574
	PT PHE Jambi Merang	34.888
	PT PHE Kakap	414
	PT PHE Kampar	200
	PT PHE MNK Sumatera Utara	20
	PT PHE NSB	2.182
	PT PHE NSO	986
	PHE Nunukan Company	14
	PT PHE Ogan Komering	384
	PT PHE ONWJ	25.003
	PT PHE OSES	3.707
	PT PHE Raja Tempirai	30
	PT PHE Salawati Basin	359
	PT PHE Siak	679
	PT PHE Tomori Sulawesi	108.117
	PT PHE West Madura Offshore	10.104
	PT PERTAMINA EP CEPU	452.167
	PT ELNUSA Tbk	12.109
	PT Badak NGL	2.999
	Patra Drilling Contractor	21.262
	BUT NATUNA 2 BV	21.249
	PT Pertamina Hulu Mahakam	142.148
	PT.Pertamina Hulu Sanga Sanga	7.230
	PT PHE Randugunting	0
	PT PHE Tuban East Java	0
	PT PEPC ADK	0
	PT PDSI	0
	PT PERTAMINA HULU INDONESIA - PHI	0
	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	0
	Pertamina Internasional EP	0
<b>Total</b>		<b>1.697.381</b>

Kurs Neraca: 15,439  
per 31 Desember 2023



Data dalam ratusan juta dollar  
Data in hundred million dollar

Kurs Neraca: 15,439  
per 31 Desember 2023

<b>Full Year 2023 (in thousands)</b>		
<b>Algeria</b>		
	Block 405A	<b>76.442</b>
<b>Irak</b>		
	West Qurna	<b>9.824</b>
<b>Malaysia</b>		
	Block SK	7.589
	Block K	14.201
	Block H	15.250
<b>Maure Et Prom Grup</b>		
<b>Angola</b>		
	Block 3/05	12.120
	Block 3/05A	80
	HQ Angola	-
<b>Belgium</b>		
		<b>6</b>
<b>Spain (MP Iberoamerica)</b>		
<b>France</b>		
	EMP	3.440
	West Africa	388
	Angola holding	-
	Trading	859
	Caroil France	-
	Namibia holding	-
		-
	Colombia holding	-
	Mios	-
	Canada holding	-
	MP Services	-
<b>Gabon</b>		
	Ezanga	16.701
	Kari	-
	Nyanga	-
	HQ MPG	-
	Caroil Drilling Solution	453
<b>Swiss</b>		
		<b>-20</b>
<b>Tanzania</b>		
	BRM	-
	Wentworth	-
	MPEP Tanzania	6.772
	CMBL	4.813
	BRM subsidiary	-
	Caroil Tanzanie	-
<b>Total</b>		<b>169.430</b>